

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA HUTANAGODANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**DEPITA SIMAREMARE
208520049**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/26

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA HUTANAGODANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

DEPITA SIMAREMARE
208520049

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

BALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

Nama : Depita Simaremare

NPM : 208520049

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

(Behy Mashitho Batubara, S.Sos, M.A.P)

Pembimbing

Mengetahui

(Dr. Yulianto Lubis, S.Sos, M.P)

Dekan

(Dedina Rully Muda M.A.P)

Ku Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 16 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGASAKHIR/SKRIPSIUNTUKKEPENTINGANAKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Depita Simaremare
NPM : 208520049
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universita Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive
Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Strategi Pemerintah
Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara
Kabupaten Tapanuli Utara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan
Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak
cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 April 2026
Yang Menyatakan



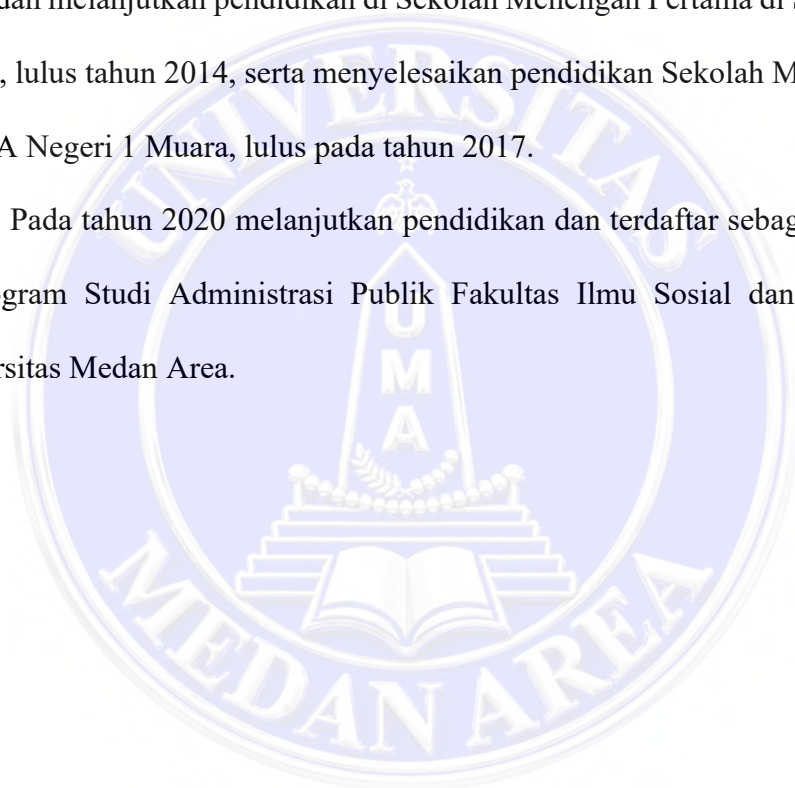
Depita Simaremare
208520049

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Bunturaja, kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 November 2001 dari Ayahanda Jenson Simaremare dan Ibu Meri Pardede. Peneliti merupakan putri kandung dari 9 bersaudara.

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 177664 Sitanggor, lulus tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Muara, lulus tahun 2014, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Muara, lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA HUTANAGODANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UATRA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait dalam pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang dilakukan melalui perencanaan pengembangan pariwisata, penyediaan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, serta promosi potensi wisata desa. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, koordinasi antar *stakeholder* masih perlu ditingkatkan agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Hutanagodang sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah daerah, kolaborasi dengan masyarakat, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif guna meningkatkan daya saing desa wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata kunci : Strategi Pemerintah Daerah, Desa Wisata, Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat

**LOCAL GOVERNMENT STRATEGY IN DEVELOPING HUTANAGODANG
TOURISM VILLAGE, MUARA DISTRICT, SOUTH TAPANULI
REGENCYTHE**

ABSTRACT

This study aims to analyze the local government's strategy in developing the Hutanagodang Tourism Village in Muara District, North Tapanuli Regency. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation with the village government, the community, and relevant stakeholders involved in tourism village management. The results indicate that the local government's strategy for developing the Hutanagodang Tourism Village encompasses tourism development planning, provision of supporting infrastructure, community empowerment, and promotion of the village's tourism potential. However, implementation has not been optimal due to budget constraints, inadequate infrastructure, and low community participation in tourism village management. Furthermore, coordination between stakeholders needs to be improved to ensure sustainable tourism village development. This study concludes that the successful development of the Hutanagodang Tourism Village is heavily influenced by the active role of the local government, collaboration with the community, and adequate policy support and resources. Therefore, a more integrated and participatory strategy is needed to improve the competitiveness of the tourism village and the well-being of the local community.

Keywords: Local Government Strategy, Tourism Village, Tourism Development, Community Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara”. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang berpartisipasi, dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Walid Musthafa, S.Sos,M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan waktu selama penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tepat waktu.

Terkhusus kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayah Jenson Simaremare dan Ibu Meri Pardede yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang baik memotivasi dan materi dari awal masuk perkuliahan sampai menyelesaikan studi. Delapan saudara penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan juga materi kepada penulis, tanpa doa dan pengorbanan mereka saya tidak dapat sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan penulis, tetapi penulis ingin terus belajar supaya lebih baik lagi. Maka dari itu penulis sangat berharap masukan dan saran yang membangun sehingga penulisan karya ilmiah dapat lebih baik lagi.

Medan, Februari 2026
Penulis.

Depita Simaremare
208520049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA	
PENGANTAR	vii
i	
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR	
LAMPIRAN.....	xii
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Strategi dalam Administrasi Publik.....	9
2.1.1 Konsep Strategi.....	9
2.1.2 Strategi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Indikator Strategi	13
2.2 Peran Pemerintah Daerah	14
2.3 <i>Colloborative Governance</i>	16
2.4 <i>Community Based Tourism</i>	17
2.5 Konsep Desa Wisata.....	19
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

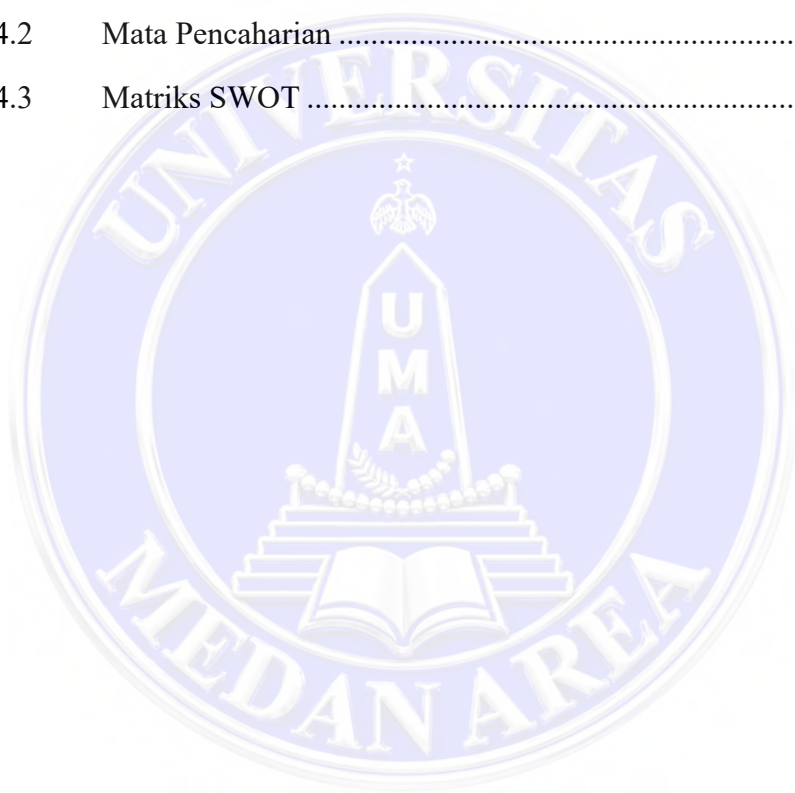
3.2.1 Lokasi Penelitian	29
3.2.1 Waktu Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Data Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Desa Wisata Hutanagodang	39
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Hutanagodang.....	39
4.1.4 Kondisi Demografi, Sosial Budaya dan Ekonomi.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata	42
4.2.2 Partisi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.....	48
4.2.3 Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	51
4.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.....	53
4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata	54
4.3.2 Partisi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.....	60
4.3.3 Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	61
4.3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.....	63
4.4 Analisis SWOT Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.....	64
4.4.1 Identifikasi Faktor Internal	65
4.4.2 Identifikasi Faktor Eksternal	67
4.4.3 Matriks SWOT Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	29
Tabel 3.2	Informan Penelitian	31
Tabel 3.3	Teknik Pengumpulan Data	32
Tabel 4.1	Rincian Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.2	Mata Pencarian	42
Tabel 4.3	Matriks SWOT	68



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Kategori Desa Wisata Hutanagodang.....	4
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1	Peta Desa Wisata Hutanagodang.....	37
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Hasil Wawancara	77
Lampiran 2	Bukti Kunjungan.....	82
Lampiran 3	Objek Penelitian.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan Bangsa dan Negara untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Menurut Undang – Undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kesejahteraan suatu desa dapat diperoleh dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa demi meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi *leading* pembangunan. Pariwisata menjadi sektor strategis karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah.

Data pemerintah menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 3,96% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2025, yang menunjukkan peran signifikan sektor ini dalam struktur perekonomian Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Selain itu, laporan OECD menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 3,6% pada tahun 2022, dan diproyeksikan meningkat seiring pemulihan sektor pariwisata nasional (OECD, 2024). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Prayogo (2018), Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi. Menurut Conlin dan Baum dalam Kuswandi (2020), Strategi kebijakan pengembangan pariwisata merupakan hal penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah Indonesia mengembangkan konsep desa wisata sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. Pengembangan desa wisata didukung oleh berbagai kebijakan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melaksanakan berbagai program

pengembangan desa wisata seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) sebagai upaya meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola potensi wisata lokal secara berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal melalui penyediaan infrastruktur, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa wisata. Peran strategis pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata karena pemerintah daerah merupakan aktor utama yang memahami kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar karena berada di kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional Danau Toba yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata Nasional. Kecamatan Muara sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kuat, seperti keindahan pesisir Danau Toba, rumah adat Batak, budaya tenun ulos, serta berbagai aktivitas wisata berbasis masyarakat yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Salah satu desa di Kecamatan Muara yang memiliki potensi wisata adalah Desa Hutanagodang.

Desa Hutanagodang memiliki letak geografis yang strategis karena berada di kawasan pesisir Danau Toba serta memiliki potensi wisata alam dan

budaya yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 496 Ha, dimana 70% berupa lahan yang berbukit-bukit, 26% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan 4% digunakan untuk pemukiman. Sama halnya seperti desa-desa lain di Indonesia, Desa Hutanagodang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap kemudahan pola tanam pada lahan pertanian. Potensi desa tersebut meliputi keberadaan rumah adat Batak, aktivitas tenun ulos tradisional, serta panorama alam yang mendukung pengembangan wisata berbasis lingkungan dan budaya. Meskipun memiliki potensi yang besar, Desa Wisata Hutanagodang saat ini masih termasuk dalam kategori desa wisata rintisan sehingga pengelolaannya belum berkembang secara optimal.



Gambar 1.1 Kategori Desa Wisata Hutanagodang

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang tepat agar Desa Hutanagodang dapat berkembang menjadi desa wisata yang maju serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Konsep pengembangan wisata yang diusung desa ini berfokus pada pemanfaatan lokasi wisata yang secara langsung berada di kawasan pesisir

Danau Toba sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Namun demikian, pengembangan objek wisata di Desa Hutanagodang masih menghadapi berbagai kendala. Pengelolaan wisata belum optimal baik dari sisi masyarakat, pengelola, maupun pemerintah daerah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara masih tergolong terbatas, seperti akses transportasi dari pusat kota menuju lokasi wisata, ketersediaan penginapan bagi wisatawan, serta sarana informasi pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pariwisata masih belum memadai, padahal keberadaan fasilitas yang memadai dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan wisata sekaligus meningkatkan pendapatan sektor pariwisata daerah.

Hambatan lain dalam pengembangan objek wisata antara lain keterbatasan pendanaan yang berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur wisata, seperti kondisi jalan menuju lokasi yang masih rusak, belum tersedianya taman bermain, serta minimnya fasilitas umum lainnya. Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing objek wisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan agar objek wisata di Desa Hutanagodang dapat memberikan manfaat yang optimal, baik bagi masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Pengembangan tersebut harus didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, manajemen pengelolaan yang baik, serta sistem keamanan yang terjamin sehingga mampu menciptakan objek wisata yang

memiliki daya tarik dan daya jual baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, meskipun desa ini berada di kawasan strategis pariwisata nasional, informasi mengenai potensi wisata Desa Hutanagodang masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi secara luas dalam media promosi resmi maupun media sosial serta dalam penelitian belum begitu banyak peneliti yang membahas objek penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan strategi pengembangan dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa wisata Hutanagodang kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Hutanagodang dalam pengembangan Desa wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?

3. Bagaimana dampak pengembangan Desa Wisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Hutanagodang dalam pengembangan Desa wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Untuk mengetahui dampak pengembangan Desa Wisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentang strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata hutanagodang kecamatan muara kabupaten tapanuli utara ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis khususnya dibidang pariwisata.

2. Secara Praktis

- 1) Manfaat bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengembangan desa wisata di desa hutanagodang.
- 2) Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengembangkan pariwisata di desa hutanagodang.
- 3) Secara Akademis, sebagai proses pembelajaran penulis untuk terjun langsung ke masyarakat dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi dalam Administrasi Publik

2.1.1 Konsep Strategi

Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bidang militer yang merujuk pada seni seorang pemimpin dalam merencanakan dan mengarahkan operasi untuk mencapai tujuan tertentu. *Oxford English Dictionary* mendefinisikan strategi sebagai seni seorang panglima dalam mengatur gerakan dan operasi besar untuk memenangkan suatu kampanye. Dalam perkembangan ilmu manajemen dan administrasi publik, konsep strategi mengalami perluasan makna menjadi suatu rencana terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Chandler (1962), strategi didefinisikan sebagai penentuan tujuan jangka panjang organisasi serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Ristarnado *et al.*, 2019). Berikut pengertian strategi secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana yang dirumuskan secara sistematis oleh sebuah organisasi baik organisasi publik maupun organisasi swasta dan dijadikan sebagai langkah-langkah yang terarah dan berorientasi pada jangka panjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan.

Dalam konteks administrasi publik, strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Strategi meliputi proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan guna merespons

perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Bryson, 2018). Dengan demikian, strategi menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Higgins (1985) yang merujuk pada pemikiran Schendel dan Hofer menjelaskan bahwa strategi organisasi terdiri dari beberapa tingkatan yang disebut *master strategy*, yaitu:

1. *Enterprise Strategy* berkaitan dengan hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungan eksternal. Dalam sektor publik, strategi ini mencerminkan bagaimana pemerintah merespons kebutuhan masyarakat serta membangun legitimasi publik melalui pelayanan yang baik.
2. *Corporate Strategy* berkaitan dengan misi dan arah utama organisasi. Dalam pemerintahan daerah, strategi ini terlihat pada penetapan visi pembangunan daerah dan prioritas kebijakan yang dijalankan.
3. *Business Strategy* berkaitan dengan cara organisasi menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam sektor publik, strategi ini berkaitan dengan cara pemerintah menjalankan program pembangunan, termasuk strategi pengembangan pariwisata.
4. *Functional Strategy* merupakan strategi pendukung seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, perencanaan, dan pengendalian program yang menunjang keberhasilan strategi utama organisasi.

2.1.2 Strategi Sektor Publik

Strategi sektor publik merupakan pendekatan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan kepada

masyarakat. Strategi dalam sektor publik tidak berorientasi pada keuntungan finansial semata, melainkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan daerah (Bryson, 2018). Dalam praktiknya, organisasi publik dapat menggunakan berbagai jenis strategi, antara lain (David, 2004):

1. Strategi Integrasi

Pemerintah melakukan koordinasi antar lembaga, sektor, dan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

2. Strategi Intensif

Dilakukan melalui penguatan program yang sudah ada, misalnya pengembangan destinasi wisata melalui promosi dan peningkatan kualitas produk wisata.

3. Strategi Diversifikasi

Mengembangkan inovasi program baru yang dapat meningkatkan daya saing daerah, seperti pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata berbasis masyarakat.

4. Strategi Defensif

Dilakukan melalui evaluasi program, efisiensi anggaran, serta restrukturisasi kebijakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya atau perubahan lingkungan.

Selain itu, Porter dalam David (2004) menjelaskan strategi umum yang dapat diterapkan organisasi, yaitu strategi keunggulan biaya,

diferensiasi, dan fokus. Dalam sektor publik, konsep ini dapat diterapkan melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan keunikan destinasi wisata, serta fokus pada potensi lokal daerah.

2.1.3 Indikator Strategi

Dalam administrasi publik, keberhasilan strategi dapat diukur melalui beberapa indikator yang berkaitan dengan proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Bryson (2018) menjelaskan bahwa strategi sektor publik mencakup tahapan perencanaan strategis, implementasi program, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja organisasi publik. Selain itu, Poister (2010) menekankan pentingnya koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan strategi pemerintah. Berdasarkan pandangan tersebut, indikator strategi dalam penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses penetapan visi, misi, tujuan, dan program pembangunan yang menjadi pedoman organisasi publik dalam mencapai tujuan. Perencanaan strategis membantu pemerintah daerah menentukan arah kebijakan pengembangan desa wisata secara sistematis (Bryson, 2018).

2. Implementasi Program

Implementasi program merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata di lapangan (Poister, 2010).

3. Koordinasi dan Kolaborasi

Strategi sektor publik memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan termasuk pengembangan desa wisata (Bryson, 2018).

4. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya meliputi penggunaan sumber daya manusia, anggaran, serta potensi lokal secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis organisasi publik (Higgins, 1985).

5. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi merupakan proses monitoring dan pengukuran kinerja program untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi serta sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa depan (Poister, 2010).

2.2 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Nurcholis (2011), desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota dan memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa berbeda dengan kelurahan karena memiliki hak otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sabtoni (2005) menjelaskan bahwa pemerintahan

desa memiliki beberapa kewenangan, yaitu kewenangan asal-usul, kewenangan devolutif, kewenangan distributif, serta kewenangan menolak tugas pembantuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal seperti desa wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan.

Menurut Ndraha (2011), pemerintah daerah memiliki fungsi utama dalam perencanaan pembangunan, pengaturan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, menurut Rasyid (2000), peran pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa fungsi utama yaitu

1. Fungsi pelayanan publik
2. Fungsi pembangunan
3. Fungsi pemberdayaan masyarakat
4. Fungsi pengaturan (regulasi)

Dalam konteks pengembangan desa wisata, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan pariwisata daerah, pembangunan

infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas masyarakat, serta promosi destinasi wisata.

2.3 *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam forum kolektif yang bersifat formal, konsensus, dan berorientasi pada tujuan bersama.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *collaborative governance* menekankan dialog bersama antar stakeholder pembangunan kepercayaan komitmen terhadap tujuan bersama berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan program Dialog Bersama Antar Stakeholder Proses kolaborasi diawali dengan komunikasi dan diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan dan solusi yang akan diambil. Dialog ini bertujuan membangun pemahaman bersama serta menghindari konflik kepentingan.

1. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan antar pihak merupakan fondasi utama dalam kolaborasi.

Tanpa adanya kepercayaan, kerja sama sulit dilakukan secara efektif.

Oleh karena itu, transparansi informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting.

2. Komitmen terhadap Tujuan Bersama

Setiap stakeholder yang terlibat harus memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Komitmen bersama memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

3. Berbagi Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Program

Collaborative governance mendorong pembagian peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian tanggung jawab ini membantu meningkatkan efektivitas program serta memperkuat sinergi antar stakeholder.

2.4 *Community Based Tourism*

Community Based Tourism (CBT) merupakan konsep pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pengambilan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan wisata di wilayahnya. Melalui CBT, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan destinasi, serta distribusi manfaat ekonomi sehingga pariwisata dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan lokal.

Menurut Murphy (1985) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi tersebut tidak hanya dalam kegiatan operasional pariwisata, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga nilai sosial, budaya, dan identitas lokal yang menjadi daya tarik wisata.

Hausler dan Strasdas (2003) menyebutkan bahwa prinsip utama dalam *Community Based Tourism* meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan, yaitu: Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi unsur utama dalam CBT karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan langsung mengenai potensi, budaya, dan kondisi wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program wisata memungkinkan terciptanya pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Partisipasi juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program wisata sehingga keberlanjutan program lebih terjamin.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal CBT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha lokal seperti homestay, kerajinan tradisional, kuliner khas, serta jasa pemandu wisata. Pemberdayaan ekonomi ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga manfaat pariwisata

dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal. Pelestarian Budaya dan Lingkungan Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya, tradisi, serta lingkungan alam.

Masyarakat lokal didorong untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai daya tarik wisata sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem agar kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan. Pengelolaan Berbasis Komunitas Dalam CBT, masyarakat memiliki peran dalam mengelola kegiatan wisata melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi desa, atau organisasi lokal lainnya. Pengelolaan berbasis komunitas mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan manfaat ekonomi di antara anggota masyarakat.

2.5 Konsep Desa Wisata

Menurut Nuryanti (1993), desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya lokal sebagai daya tarik utama pariwisata. Konsep desa wisata tidak hanya berfokus pada penyediaan objek wisata semata, tetapi juga pada pengalaman autentik yang diperoleh wisatawan melalui interaksi langsung dengan kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan potensi lokal, serta pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai sosial dan budaya setempat.

Secara konseptual, pengembangan desa wisata bertujuan menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah konsep desa membangun, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya agar mampu mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan desa wisata juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi dan sumber daya lokal.

Dalam implementasinya, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui berbagai bentuk fasilitasi seperti pendampingan, pelatihan kapasitas masyarakat, penyediaan infrastruktur, akses pembiayaan, promosi wisata, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Pendampingan tersebut dapat berupa penguatan tata kelola desa wisata, pengembangan usaha pariwisata seperti homestay, paket wisata, kerajinan lokal, dan kuliner tradisional. Selain itu, dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Pada aspek pemasaran, pemerintah juga berperan dalam membantu promosi melalui pembuatan website, penyelenggaraan event dan pameran wisata, serta kerja sama dengan agen perjalanan dan media promosi

pariwisata. Pengembangan desa wisata juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tingkat daerah, pelaksanaan program desa wisata dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan desa wisata secara terpadu dan berkelanjutan. Suwarti dan Yuliamir (2017) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata melibatkan tiga unsur utama, yaitu manusia, tempat, dan waktu. Unsur manusia berperan sebagai subjek utama yang menjalankan kegiatan pariwisata, baik sebagai pengelola maupun pelaku ekonomi lokal. Unsur tempat merujuk pada kondisi fisik wilayah yang menjadi lokasi kegiatan wisata, termasuk potensi alam, budaya, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Sedangkan unsur waktu berkaitan dengan lamanya kunjungan wisatawan dan pengelolaan aktivitas wisata secara efektif agar memberikan pengalaman yang optimal bagi pengunjung.

Selanjutnya, Yoeti (2006) menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan yang meliputi keberlangsungan ekologi, sosial budaya, ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberlanjutan ekologi mengharuskan pengelolaan wisata menjaga kelestarian lingkungan alam. Keberlanjutan sosial budaya menuntut

pelestarian nilai tradisi dan identitas lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Keberlanjutan ekonomi bertujuan memastikan kegiatan pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi tujuan utama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata. Dengan demikian, pengembangan desa wisata merupakan proses terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang masalah strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di desa dan menjadikan acuan sebagai referensi, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Benni Olan Hutapea (2015)	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan berbagai	Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah daerah (kabupaten) dalam pengembangan kawasan wisata

		Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	program dan strategi dalam pengembangan kawasan wisata Muara. Namun, tidak semua program terealisasi secara optimal akibat keterbatasan anggaran dan minimnya keterlibatan pihak ketiga sebagai investor. Dari aspek perencanaan dan pengorganisasian strategi dinilai cukup baik, termasuk pelibatan masyarakat dan tokoh adat, meskipun belum maksimal. Pelaksanaan dan pengawasan masih lemah karena keterbatasan dana serta kurangnya monitoring dari DPRD. Secara keseluruhan, strategi pengembangan dinilai relatif baik, namun masih memiliki kelemahan pada tahap implementasi dan pengawasan.	secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata Hutanagodang. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, dan penelitian penulis menitikberatkan pada peran dan strategi pemerintah desa sebagai aktor utama.
2	Rotua Kristin Simamora & Rudi Salam Sinaga (2016)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi pasar domestik dan mancanegara serta kelestarian sumber daya pariwisata. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata lebih dominan sebagai fasilitator dibandingkan sebagai	Penelitian ini menekankan pada peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya secara luas di tingkat kabupaten, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada strategi pemerintah desa secara spesifik dalam mengembangkan desa wisata Hutanagodang, baik

			motivator dan dinamisor. Peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, bantuan dana stimulan bagi masyarakat, promosi objek wisata, serta pemberian kemudahan bagi investor dan pengusaha wisata.	dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
3	Iklas Ramadhan (2023)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang dengan Pendekatan Analisis SWOT Komponen 3A Pariwisata	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Hutanagodang memiliki kekuatan utama berupa potensi wisata alam seperti hamparan sawah, perbukitan, dan panorama Danau Toba, serta potensi wisata budaya berupa pusat kerajinan kain tradisional ulos sebagai ikon budaya Batak. Selain itu, desa ini memiliki aksesibilitas yang baik karena dekat dengan Bandara Internasional Silangit dan berada pada lokasi strategis di pesisir Danau Toba.	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT dengan fokus pada komponen 3A pariwisata, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pemerintah desa sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata. Penelitian penulis tidak hanya melihat potensi dan strategi pengembangan, tetapi juga menelaah peran, kebijakan, dan implementasi strategi pemerintah desa.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan alur logis hubungan antara konsep, teori, dan fokus penelitian.

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017), kerangka berpikir adalah

model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel yang telah ditetapkan sebagai masalah penelitian. Sementara itu, Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan yang menempatkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata.

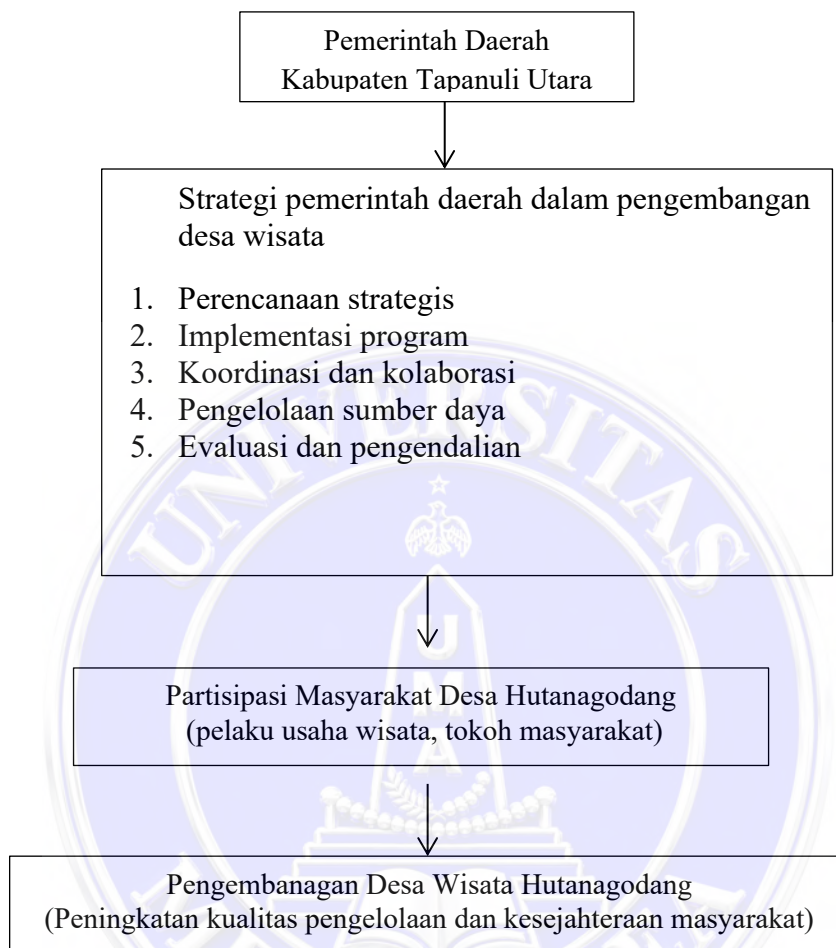
Dalam konteks administrasi publik, strategi pemerintah daerah merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Strategi tersebut meliputi proses perencanaan strategis, implementasi program, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi dan pengendalian program pembangunan (Bryson, 2018). Strategi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi desa wisata secara terarah dan berkelanjutan.

Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari peran strategis pemerintah

daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung, promosi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan desa wisata. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya tarik desa wisata serta memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.

Selain peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Konsep Community Based Tourism (CBT) menekankan bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan pariwisata. Keterlibatan masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha lokal, serta tokoh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap desa wisata serta menjamin keberlanjutan pengelolaan pariwisata. Strategi pemerintah daerah yang efektif, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, diharapkan mampu mendorong pengembangan Desa Wisata Hutanagodang secara optimal. Pengembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, pemanfaatan potensi alam dan budaya secara berkelanjutan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara strategi pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan pengembangan Desa

Wisata Hutanagodang sebagai satu kesatuan proses pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai strategi pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif lapangan memungkinkan peneliti memahami konteks sosial secara utuh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena individu maupun kelompok, peristiwa, sikap, persepsi, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang relevan (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, data yang

diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Lokasi ini dipilih karena Desa Hutanagodang memiliki potensi wisata alam dan budaya serta sedang dikembangkan sebagai desa wisata, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu dari bulan Maret 2025 sampai dengan Mei 2025. Rentang waktu tersebut digunakan untuk proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data penelitian.

Tabel 3.1 Waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Agus	Sep	Okt	Nov	Jan	Mar	Apr	Mei	Nov	Jan	Feb
		2024				2025					2026	
1	Penyusunan Proposal											
2	Seminar Proposal											
3	Perbaikan Proposal											
4	Pengajuan Surat Penelitian											
5	Pelaksanaan Penelitian											

6	Seminar Hasil											
7	Perbaikan Seminar Hasil											
8	Pendaftaran Skripsi											
9	Skripsi											

Sumber: diolah peneliti 2026

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang. Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Dalam penelitian kualitatif, informan dibedakan menjadi informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan penelitian. Informan utama adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan atau kegiatan yang diteliti. Informan pendukung berfungsi memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis penelitian (Martha & Kresno, 2016). Adapun rincian informan penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jenis Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan
1	Informan Kunci	Kepala Desa Hutanagodang “Ripson siregar”	1 orang	Memiliki kewenangan penuh dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta strategi pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.
2	Informan Utama	Sekretaris Desa Hutanagodang “Sabar R Siregar”	1 orang	Mengetahui secara teknis perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi program pengembangan desa wisata.
3	Informan Pendukung	Masyarakat Desa Hutanagodang “Diana sianturi”	1 orang	Terlibat langsung dan merasakan dampak pengembangan desa wisata, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.
4	Informan Pendukung	Pengunjung Desa Wisata Hutanagodang “Gracaselin”	1 orang	Memberikan pandangan dan penilaian objektif terhadap daya tarik wisata, fasilitas, serta pelayanan desa wisata.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap kondisi lapangan (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai strategi pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang, pelaksanaan program, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan,

namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan mendalam (Moleong, 2018).

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi Desa Wisata Hutanagodang untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi objek wisata, sarana dan prasarana pendukung, aktivitas wisata, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memahami kondisi faktual di lapangan (Sugiyono, 2019).

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Data dokumentasi meliputi dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, dokumen program pengembangan desa wisata, foto kegiatan wisata, serta arsip atau laporan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata Hutanagodang. Rincian teknik pengumpulan data disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Fokus Data yang Dikumpulkan
1	Wawancara Mendalam	Kepala Desa Hutanagodang	Strategi pemerintah desa, kebijakan, perencanaan, dan kendala pengembangan desa wisata.
2		Sekretaris Desa Hutanagodang	Pelaksanaan program, koordinasi, serta pengelolaan administrasi pengembangan desa wisata.

3		Masyarakat Desa Hutanagodang	Bentuk partisipasi masyarakat dan dampak pengembangan desa wisata.
4		Pengunjung Desa Wisata Hutanagodang	Penilaian terhadap daya tarik wisata, fasilitas, dan pelayanan desa wisata.
5	Observasi Lapangan	Lokasi Desa Wisata Hutanagodang	Kondisi sarana dan prasarana wisata, aktivitas wisata, dan keterlibatan masyarakat.
6	Dokumentasi	Dokumen dan arsip desa	RPJMDes, program desa wisata, foto kegiatan, dan data pendukung lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, sebagaimana dikemukakan dalam Sugiyono (2018). Analisis data kualitatif dilakukan secara berlangsung terus-menerus sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul seluruhnya, sampai data dianggap jenuh dan kesimpulan penelitian dapat ditarik secara valid. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan memahami data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang. Adapun tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi terhadap kondisi dan aktivitas pengembangan desa wisata, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal penelitian dan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait strategi pemerintah daerah serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan, dirangkum, dan dipilah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan: Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sementara data yang penting akan dipertajam agar memudahkan proses

analisis selanjutnya. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti dalam menyusun data secara sistematis dan terarah.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, dan bagan, sesuai dengan kebutuhan analisis. Penyajian data bertujuan untuk:

- Mempermudah peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar data
- Membantu memahami kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan
- Menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat menginterpretasikan makna data secara lebih mendalam serta mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh dari hasil penyajian data bersifat sementara, dan akan terus diuji kebenarannya melalui proses verifikasi dengan data lapangan. Verifikasi dilakukan dengan cara:

- Membandingkan hasil wawancara antar informan
- Mencocokkan data hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi
- Mengkaji kembali data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian

Apabila kesimpulan yang diperoleh didukung oleh data yang konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel. Tahap ini bertujuan untuk

menghasilkan temuan penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah mengenai strategi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai strategi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang

Pemerintah Desa Hutanagodang telah menerapkan strategi pengembangan desa wisata yang berfokus pada penguatan kelembagaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemanfaatan potensi alam dan budaya lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat.

BUMDes diposisikan sebagai instrumen utama dalam menunjang kegiatan pariwisata desa, khususnya dalam pengelolaan homestay, pemasaran produk lokal, serta penyediaan jasa pendukung wisata. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya mengoptimalkan potensi alam kawasan Danau Toba, situs budaya dan sejarah, serta kerajinan khas berupa Ulos Harungguan sebagai daya tarik utama desa wisata.

Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan kualitas SDM,

infrastruktur pendukung wisata, serta minimnya pelatihan dan pendampingan kepariwisataan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang

Partisipasi masyarakat Desa Hutanagodang dalam pengembangan desa wisata sudah mulai terlihat, terutama dalam bentuk keterlibatan sebagai pengelola homestay, penyedia kuliner lokal, pengrajin tenun ulos, serta partisipasi dalam promosi desa wisata melalui media sosial. Masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah desa dan beberapa program pengembangan desa wisata yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, minimnya pelatihan sadar wisata, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat.

3. Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun dampaknya masih terbatas dan belum dirasakan secara menyeluruh. Dampak yang mulai dirasakan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, khususnya pengrajin tenun ulos dan

pengelola homestay, serta terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Dari sisi sosial budaya, pengembangan desa wisata turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya lokal. Namun secara umum, sektor pariwisata belum menjadi sumber pendapatan utama masyarakat karena jumlah kunjungan wisatawan yang masih terbatas dan belum stabil.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata

Faktor pendukung utama pengembangan Desa Wisata Hutanagodang meliputi potensi alam dan budaya yang beragam, letak geografis yang strategis di kawasan Danau Toba, dukungan pemerintah desa, serta keberadaan BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan kepariwisataan, keterbatasan anggaran, serta infrastruktur pendukung wisata yang belum memadai. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan desa wisata yang lebih terarah melalui analisis SWOT.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Hutanagodang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan yang terstruktur

dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pelayanan wisata, pengelolaan homestay, dan sadar wisata. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat peran BUMDes dan Pokdarwis serta mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata secara bertahap.

2. Bagi Masyarakat Desa Hutanagodang

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan kegiatan pariwisata. Kesadaran akan pentingnya keramahan, kebersihan lingkungan, dan pelestarian budaya lokal perlu terus ditingkatkan agar Desa Wisata Hutanagodang dapat berkembang secara berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pendampingan, pelatihan, serta promosi desa wisata secara lebih intensif. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Hutanagodang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengembangan Desa Wisata Hutanagodang dari perspektif yang lebih luas, seperti analisis kelayakan ekonomi, strategi pemasaran wisata, atau model pengembangan desa wisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise*. MIT Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- David, F. R. (2004). *Strategic management: Concepts and cases*. Pearson Education.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Häusler, N., & Strasdas, W. (2003). *Training manual for community-based tourism*. InWEnt.
- Higgins, J. M. (1985). *Strategy: Formulation, implementation, and control*. Dryden Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional*.
- Kuswandi. (2020). Strategi pengembangan pariwisata daerah. *Jurnal Pariwisata*.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Routledge.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, perspective and challenges. *Tourism Management*, 14(2), 87–94.
- OECD. (2024). *Tourism trends and policies*. OECD Publishing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata Nasional.
- Poister, T. H. (2010). The future of strategic planning in the public sector. *Public Administration Review*, 70(s1), 246–254. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>
- Prayogo, R. R. (2018). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Pariwisata*, 5(2), 45–56.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan*. PT Yarsif Watampone.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Suwarti, S., & Yuliamir, H. (2017). Pengembangan pariwisata daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 12–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yoeti, O. A. (2006). *Pariwisata budaya: Masalah dan solusinya*. Pradnya
Paramita.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara peneli dengan informan kunci desa wisata Hutanagodang :

Nama :Ripson siregar

Jabatan : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban Kepala Desa
1	Apa visi pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata?	Menjadikan desa sebagai destinasi wisata berbasis budaya lokal dan alam yang berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.
2	Apa saja potensi wisata yang dimiliki oleh desa ini?	Potensi alam (air terjun, sawah, hutan), budaya (tari tradisional, kerajinan), dan kuliner lokal.
3	Strategi apa yang digunakan dalam pengembangan desa wisata?	Melibatkan masyarakat melalui pelatihan, membentuk Pokdarwis, dan bekerja sama dengan dinas pariwisata serta lembaga pendidikan.
4	Bagaimana cara pemerintah desa melibatkan masyarakat?	Melalui musyawarah desa, pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok kerja wisata, dan pemberdayaan BUMDes.
5	Apakah ada tantangan dalam mengembangkan desa wisata?	Ya, seperti kurangnya dana, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran

		masyarakat terhadap potensi pariwisata.
6	Apa peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata?	BUMDes berperan dalam pengelolaan homestay, penyewaan perlengkapan wisata, dan menjual produk lokal seperti makanan atau cinderamata.
7	Bagaimana upaya promosi desa wisata dilakukan oleh pemerintah desa?	Melalui media sosial, kerja sama dengan influencer, membuat brosur, dan mengikuti pameran wisata di tingkat kabupaten/provinsi.
8	Apakah pemerintah desa bekerja sama dengan pihak luar (universitas, LSM, dll)?	Ya, kami bekerja sama dengan universitas untuk riset dan pelatihan, serta LSM dalam hal pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan.
9	Bagaimana pemerintah desa menjaga kelestarian budaya dan lingkungan?	Dengan menetapkan aturan zonasi wisata, edukasi masyarakat, serta melibatkan tokoh adat dan pemuda dalam pelestarian budaya lokal.
10	Apa harapan Bapak terhadap pengembangan desa wisata ke depan?	Harapannya desa ini bisa mandiri secara ekonomi, dikenal secara luas, dan tetap mempertahankan jati diri budaya serta kelestarian alam.

Hasil dari wawancara peneliti dengan informan Pendukung desa wisata Hutanagodang :

Nama :Sabar R Siregar

Keterangan :Sekretaris Desa

no	pertanyaan	Jawaban sekretaris desa
1	Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana awal mula ide pengembangan desa wisata ini muncul?	Ide pengembangan desa wisata ini berawal dari potensi alam dan budaya lokal yang belum tergali secara maksimal. Masyarakat dan pemerintah desa melihat peluang untuk menjadikannya sebagai daya tarik wisata.
2.	Apa visi dan misi desa dalam pengembangan desa wisata ini?	Visi kami adalah menjadikan desa sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Misinya mencakup pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal.
3.	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini?	Masyarakat dilibatkan secara aktif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mereka terlibat sebagai pengelola homestay, pemandu wisata, penjual produk lokal, dan lainnya.
4	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan ini?	Tantangan utamanya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung.
5	Apakah ada pelatihan atau pembinaan bagi masyarakat desa?	Ya, kami bekerja sama dengan dinas pariwisata dan lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan tentang hospitality, kebersihan, pemasaran, dan bahasa asing.
6	Sumber pendanaan pengembangan desa wisata berasal dari mana saja?	Sumbernya berasal dari Dana Desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, serta kerja sama dengan pihak swasta dan LSM.
7	Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya terhadap pengembangan desa wisata ini?	Kami berharap desa wisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan

	menjadi contoh bagi desa-desa lain.
--	-------------------------------------

Hasil dari wawancara peneliti dengan informan Pendukung desa wisata Hutanagodang :

Nama :Ibu Diana sianturi

Keterangan :masyarakat Desa

No	Pertanyaan	Jawaban Warga
1	Sejak kapan Bapak/Ibu mulai terlibat dalam kegiatan desa wisata?	Saya mulai terlibat sejak desa ini ditetapkan sebagai desa wisata, sekitar tahun 2020.
2	Apa bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam pengembangan desa wisata?	Saya membuka homestay dan ikut menjual makanan khas desa kepada para wisatawan.
3	Apakah Bapak/Ibu tergabung dalam kelompok seperti Pokdarwis atau BUMDes?	Ya, saya aktif sebagai anggota Pokdarwis dan ikut dalam beberapa kegiatan promosi wisata.
4	Apa motivasi Bapak/Ibu untuk terlibat dalam kegiatan desa wisata?	Karena ingin membantu memajukan desa dan menambah penghasilan keluarga.
5	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak desa wisata terhadap kehidupan masyarakat?	Cukup besar, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mengenalkan budaya lokal.
6	Apakah ada pelatihan atau pembinaan dari pemerintah desa?	Ya, kami mendapat pelatihan dari pemerintah desa dan dinas pariwisata tentang pelayanan tamu dan kebersihan lingkungan.
7	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peran generasi muda dalam desa wisata?	Peran mereka penting, terutama dalam promosi lewat media sosial dan pengelolaan acara wisata.
8	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perkembangan desa wisata ke depan?	Saya berharap desa ini semakin dikenal dan fasilitasnya bisa

		ditingkatkan, agar lebih nyaman untuk wisatawan.
9	Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kendala dalam pengembangan desa wisata?	Ada, seperti kurangnya promosi dan keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan toilet umum.
10	Apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada pemerintah desa atau pengelola wisata?	Agar terus melibatkan warga dalam setiap kegiatan, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata.

Hasil dari wawancara peneliti dengan informan Pendukung desa wisata Hutanagodang :

Nama :Gracaselin

Keterangan :Pengunjung

No	Pertanyaan	Jawaban Pengunjung
1	Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu mengunjungi desa wisata ini?	Saya tertarik karena mendengar bahwa desa ini punya keindahan alam dan budaya lokal yang masih terjaga.
2	Bagaimana kesan pertama Bapak/Ibu saat tiba di desa wisata ini?	Sangat menyenangkan, suasananya asri dan penduduknya ramah.
3	Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan selama di desa wisata ini?	Saya mengikuti tur keliling desa, belajar menanam padi, dan mencoba kuliner lokal.
4	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang fasilitas yang ada di desa wisata ini?	Fasilitasnya cukup baik, meskipun beberapa area masih perlu diperbaiki seperti akses jalan dan toilet umum.
5	Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pelayanan dari masyarakat atau pengelola desa wisata?	Pelayanannya bagus dan warga sangat terbuka terhadap pengunjung.

6	Apakah informasi tentang desa wisata ini mudah ditemukan?	Cukup mudah, saya menemukannya melalui media sosial dan rekomendasi teman.
7	Menurut Bapak/Ibu, apa keunikan desa wisata ini dibanding tempat lain?	Keunikan utamanya ada pada kearifan lokal, budaya yang masih dilestarikan, dan interaksi langsung dengan warga.
8	Apa yang paling berkesan selama kunjungan Bapak/Ibu di desa ini?	Mengikuti workshop kerajinan tangan bersama warga lokal, sangat menyenangkan dan berkesan.
9	Apakah Bapak/Ibu bersedia kembali berkunjung di masa mendatang?	Tentu, saya bahkan ingin mengajak keluarga saya berlibur ke sini.
10	Apa saran atau harapan Bapak/Ibu untuk pengembangan desa wisata ini ke depan?	Semoga fasilitas ditingkatkan, promosi diperluas, dan tetap menjaga kebersihan serta kelestarian budaya lokal.

Lampiran 2 Bukti kunjungan

Foto bersama kepaladesa Bapak Ripson Siregar



Foto bersama dengan Sekretaris Desa Bapak Sabar R.Siregar



Foto bersama dengan Masyarakat setempat Ibu Diana Sianturi



Foto bersama dengan Pengunjung Desa Wisata Hutanagodang Ibu
Gracaselin



Lampiran 3 Gambar Objek Penelitian



